

Ibu_Mustika_-_Artikel- Rev1.docx

by

Submission date: 16-Jul-2021 04:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 1620291603

File name: Ibu_Mustika_-_Artikel-Rev1.docx (456.2K)

Word count: 5034

Character count: 35656



Model Pendidikan Profesi Guru (PPG) Vokasi

Mustika Nuramalia Handayani¹, As'ari Djohar²

Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2}

mustika@upi.edu

Abstrak

Guru di setiap jenjang pendidikan harus memiliki sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi begitu pun dengan guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penyediaan guru SMK profesional merupakan salah satu tugas khusus dalam revitalisasi SMK. Pendidikan Profesi Guru Vokasi (PPGV) diharapkan dapat menghasilkan guru-guru profesional untuk mendidik generasi unggul dan kompetitif. Model PPGV di Indonesia saat ini menggunakan model konkuren dan konsekutif. PPGV Dalam Jabatan menggunakan model konkuren di mana dalam kurikulumnya memuat keilmuan bidang studi dan pendidikan. PPGV Pra Jabatan menggunakan model konsekutif di mana dalam kurikulumnya memuat keilmuan pendidikan, sedangkan keilmuan bidang studi telah dipelajari sebelumnya pada pendidikan sarjana oleh mayoritas peserta PPG Pra Jabatan yang didominasi oleh sarjana non pendidikan

Kata Kunci: Model Pendidikan Profesi Guru; Konkuren; Konsekutif

Abstract

Teachers at every level of education must have a professional educator certificate obtained through professional education as well as vocational high school (SMK) teachers. The provision of professional vocational teachers is one of the special tasks in the revitalization of vocational schools. Vocational Teacher Professional Education (PPGV) is expected to produce professional teachers to educate a superior and competitive generation. The PPGV model in Indonesia currently uses concurrent and consecutive models. PPGV In Position uses a concurrent model where the curriculum contains scientific fields of study and education. Pre-Service PPGV uses a consecutive model in which the curriculum contains educational science, while the field of study has been previously studied in undergraduate education by the majority of Pre-Service PPG participants who are dominated by non-educational scholars.

Keywords: Teacher Professional Education Model; Concurrent; Consecutive

PENDAHULUAN

Sebagai seorang tenaga pendidik, guru memiliki peran, kedudukan, serta fungsi yang sangat strategis dalam dunia pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu akan menghasilkan manusia Indonesia berkualitas yang mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia. Guru merupakan suatu profesi yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Pengertian ini tercantum dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan, Nomor 55, Tahun 2017. Guru dapat didefinisikan sebagai tenaga pendidik profesional yang bertugas untuk membimbing, mengajar, mendidik, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik baik pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah.

Profesional memiliki definisi seseorang yang melakukan suatu pekerjaan guna memperoleh pendapatan atau sumber penghasilan yang membutuhkan kemahiran, kecakapan, maupun keahlian sesuai dengan norma ataupun standar tertentu yang memerlukan pendidikan profesi untuk mendapatkannya. Pendidik yang profesional harus memiliki kualifikasi, kemampuan, dan kompetensi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan standar nasional yang berlaku. Demikian seorang guru dapat dikatakan sebagai seorang pendidik profesional jika dapat memenuhi kemampuan dan kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan tersebut.

Pemenuhan kompetensi-kompetensi yang diperlukan dan sesuai standar dapat dicapai dengan menempuh pendidikan profesi atau sertifikasi. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru yang profesional dapat mempengaruhi kualitas peserta didiknya. Jika kualitas pendidik tidak baik, maka hal ini berpotensi menghasilkan peserta didik yang kurang kompeten dari segi keterampilan maupun kemampuan karena pengetahuan dimiliki tergantung pada kemampuan tenaga pendidik tersebut. Maka dari itu kualitas dari tenaga kependidikan pun harus diperhatikan.

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hadirnya pendidik yang profesional. Salah satu hal yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu peserta didik dapat meningkatkan potensinya agar dapat menjadi insan yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan YME, dapat menjadi insan yang berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, kreatif, cakap, mandiri juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta demokratis.

Sebagai seorang tenaga pendidik yang profesional dalam bidangnya, guru memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang hanya dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh guru berguna sebagai alat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru). Kualifikasi akademik tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi, baik melalui program sarjana maupun melalui program diploma empat. Berdasarkan hal tersebut, seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi-kompetensi tersebut kemudian akan menjadi bekal untuk melakukan pembelajaran kepada peserta didik sehingga mereka dapat berkembang menjadi siswa-siswa yang berkemampuan dan siap menghadapi dunia kerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Jenjang pendidikan menengah lembaga pendidikan vokasi dibuat dengan tujuan mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di bidang tertentu. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Dari segi definisi, pendidikan vokasi merupakan pendidikan untuk membantu proses pendewasaan sekaligus penguatan keterampilan individu agar siap untuk terjun pada dunia kerja (Wurianto, 2018). Peserta didik

yang lulus dari pendidikan vokasi merupakan lulusan-lulusan yang dipersiapkan untuk menjadi angkatan kerja yang berkompentensi sehingga siap untuk memasuki pasar tenaga kerja dan pasar industri. Senada dengan definisi tersebut, peserta didik yang telah lulus pada sekolah kejuruan harus sudah tidak diragukan kemampuannya karena dinilai telah memiliki pengalaman dan juga bekal pada bidang tertentu (Pasangaji, 2018). Demikian dapat dipahami peserta didik yang telah menempuh pendidikan vokasi sudah harus menguasai keterampilan-keterampilan pada bidang tertentu. Hal ini bertujuan untuk mendukung proses pembangunan bangsa dan negara sekaligus sebagai pemenuhan kebutuhan individu pada kehidupannya.

Hadirnya pendidikan vokasi mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2016 yang disusun dalam rangka peningkatan kualitas juga kemampuan bersaing sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Selain berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, revitalisasi pendidikan vokasi juga memiliki kepentingan-kepentingan yang dapat membantu pembangunan bangsa. Hendarma, et. al. (2016), mengungkapkan kepentingan-kepentingan tersebut adalah:

1. adanya amanah nawacita yang menyatakan bahwa akan dibangunnya sejumlah taman sains dan teknologi (*science and techno park*) di daerah-daerah, SMK maupun politeknik dengan menghadirkan sarana dan prasarana berteknologi terkini. Hal ini juga berkaitan dengan SDGs atau *Sustainable Development Goals* yang menyatakan bahwa akan terjadinya peningkatan pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan relevan termasuk keterampilan vokasi dan teknikal untuk bekerja dan berwirausaha pada tahun 2030
2. adanya kebutuhan pemenuhan 58 juta tenaga kerja terampil sampai 2030
3. adanya persaingan tingkat regional maupun global
4. adanya kebutuhan untuk menyiapkan generasi emas 2045
5. adanya kebutuhan untuk memperbaiki struktur tenaga kerja
6. adanya kebutuhan untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan efisiensi tenaga kerja

PPG Vokasi dikembangkan dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam rangka merealisasikan Inpres Nomor 9 tahun 2016 mengenai revitalisasi SMK. Program PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2017).

Kehadiran Program Studi PPG diarahkan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya:

1. kurangnya jumlah tenaga pendidik (*shortage*) khususnya pada daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal,
2. penyebaran pendidikan yang tidak seimbang (*unbalanced distribution*)
3. kualifikasi pendidikan yang di bawah standar (*under qualification*)
4. guru-guru yang kurang kompeten (*low competence*)
5. ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*missmatched*) (Pannen et al., 2017).

Permasalahan pendidikan tersebut merupakan permasalahan yang umum ditemui di Indonesia. Program Studi PPG dirancang agar dapat membantu dalam penanganan ketimpangan-ketimpangan dalam dunia pendidikan tersebut.

Program PPG dalam Jabatan diperuntukkan bagi para guru yang belum mendapatkan sertifikasi pendidik. Program PPG dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran dan penilaian, hingga uji kompetensi, sehingga diharapkan menghasilkan guru-guru

masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air (Pannen et al., 2017). Selain peserta didik, kemampuan dan kualifikasi guru sebagai seorang pengajar pun perlu untuk diperhatikan demi dapat tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional.

Kurikulum PPGV Dalam Jabatan memuat hal-hal yang berkaitan dengan pemantapan akademik pedagogik dan juga pemantapan bidang studi. PPGV Dalam Jabatan cenderung menganut model konkuren terlebih peserta didiknya adalah sarjana pendidikan yang sebelumnya telah mempelajari baik keilmuan pedagogik maupun bidang studi. Model pendidikan guru konkuren memungkinkan integrasi pendalaman bidang pedagogik ke dalam studi sehingga peserta didik memiliki kompetensi pedagogis dan kepribadian yang matang (Vainoryte & Paciauskiene, 2015). Kemampuan atau kompetensi yang baik akan menjadikan peserta didik menjadi angkatan kerja yang berpotensi untuk memajukan bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau *library research*. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan sumber bahan rujukan dari buku, artikel jurnal, dan dokumen lainnya yang dapat mendukung proses penelitian. Dijelaskan Allen (2017), pada penelitian yang menggunakan metode *library research* ini, peneliti perlu berhati-hati ketika memeriksa informasi dan dokumen yang ditemukan termasuk waktu dan tempat ditemukannya informasi serta dokumen tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian metode *library research* ini menekankan pada pencarian sumber informasi berdasarkan sumber primer untuk kemudian ditelaah dan dilakukan proses pendeskripsian berdasarkan data-data yang telah ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Revitalisasi SMK dan Pendidikan Profesi Guru Vokasi

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan formal yang menerapkan pendidikan kejuruan (Sari, 2018). Sekolah Menengah Kejuruan juga merupakan salah satu bentuk dari praktik dari program vokasi. Sebagai lembaga pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan menengah berdasarkan *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003* yang dirancang untuk mempersiapkan lulusannya bekerja di bidang tertentu. Peran SMK sebagai salah satu bentuk pendidikan vokasi adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional juga produktif (Thadi, 2019).

Program vokasi adalah program pendidikan yang memiliki tujuan menghasilkan tenaga berkompetensi juga ahli pada bidang tertentu yang siap untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan industri (Sukoco, Kurniawati, Werdani, & Windriya, 2019). Peran lembaga pendidikan vokasi diantaranya adalah untuk dapat memberikan kontribusi dengan melakukan peningkatan *softskills*, *hardskills* dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan penggunaan teknologi agar memiliki daya saing (Verawadina, Jalinus, & Asnur, 2019a). Pendidikan vokasi juga berfungsi sebagai pendorong lulusan-lulusannya agar mampu menjadi tangguh dan mandiri sehingga akan menjadi lebih siap ketika masuk ke dunia kerja dan pada akhirnya mampu turut serta membantu mensejahterakan bangsa (Raharja, 2019). Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan tersebut dapat dipahami jika pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam menghasilkan individu atau sumber daya manusia yang siap untuk turun pada dunia industri dan dunia kerja.

Pendidikan vokasi memiliki fokus pada penerapan keilmuan dibandingkan dengan berfokus pada teori atau akademis yang dalam penerapannya persentasi pembelajaran peserta didik pada pendidikan vokasi adalah 70% praktik dan 30% teori (Hartanto, Rusdarti, & Abdurrahman, 2019). Demikian pendidikan vokasi lebih banyak melakukan praktik sebagai penerapan teori sebagai bentuk pembelajaran dan pengalaman yang disiapkan untuk bekerja kelak. Penguasaan teori dan praktik yang telah dipelajari oleh seorang lulusan pendidikan vokasi pada bidang tertentu akan memberikan pengaruh pada kinerja ketika masuk ke dunia usaha maupun dunia industri.

Pendidikan vokasi juga menekankan pada kemampuan atau keterampilan yang dimiliki individu sebagai nilai jual ketika turun pada dunia industri. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan yang telah dipelajari selama masa pendidikannya untuk kemudian kompetensi yang telah dimiliki harus dapat dikolaborasikan dengan karakter *entrepreneurship* atau kewiraswastaan yang didapat berdasarkan pengalaman-pengalaman selama menempuh jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi (Ganefri et al., 2018). Hal ini juga dikemukakan oleh Mulianti, Prasetya, & Mulyadi (2018) yakni pendidikan vokasi harus dapat mengintegrasikan dan mengaitkan pembelajaran dengan berorientasikan pasar maupun bisnis ke dalam sistem pendidikannya untuk mencapai tujuan-tujuan dari pendidikan vokasi sebagai penghasil sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.

Sebagai salah satu bentuk pendidikan vokasi, SMK memiliki tujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sehingga mampu bersaing pada dunia kerja maupun dunia industri, tidak hanya bagi lulusan sekolah menengah, namun hal ini juga berlaku untuk lulusan pendidikan tinggi (Triyono, 2017). Senada dengan pernyataan tersebut, Munadi & Triwiyono (2018) mengungkapkan bahwa tujuan dari pendidikan vokasi adalah untuk mempersiapkan peserta didik yang mampu bersaing dengan kondisi dunia global yang selalu berubah-ubah juga perkembangan teknologi yang sangat pesat yang berpengaruh pada pasar kerja.

Sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan karena perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi industrialisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat juga karena adanya perubahan struktur ketenagakerjaan (Yusuf & Mukhadis, 2018). Kualitas yang diperlukan oleh lulusan pendidikan vokasi tidak hanya berupa kemampuan dasar pada bidang yang dipelajarinya. Beberapa kemampuan yang perlu dimiliki oleh lulusan vokasi adalah kemampuan *soft skills*, *hard skills*, dan juga penerapan teknologi (Verawadina, Jalinus, & Asnur, 2019b). Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami jika tujuan dari pendidikan vokasi pada dasarnya adalah menghasilkan individu yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan kualifikasi pada bidang tertentu dan juga memiliki kemampuan daya saing yang kuat untuk bekerja di lapangan yang dinamikanya selalu berubah oleh zaman.

Pelaksanaan revitalisasi SMK berkaitan dengan dua pilar dimana pilar pertama berkaitan dengan hadirnya Revolusi 4.0 dan teknologi-teknologi yang membersamainya, kemudian pilar kedua merupakan pengembangan potensi wilayah (Soebagyo & Purnama, 2019). Kehadiran Revolusi 4.0 tentu memberikan dampak dan banyak perubahan pada berbagai sektor khususnya yang berkaitan dengan dunia industri dan dunia usaha. Revitalisasi sebagai alat untuk pengembangan potensi wilayah merupakan sebuah usaha untuk menciptakan daya saing bangsa pada ranah nasional (Soebagyo & Purnama, 2019).

Peserta didik yang lulus dari lembaga pendidikan vokasi merupakan cikal bakal dari angkatan kerja yang secara tidak langsung dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan negara khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas pada dunia kerja. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Suciati & Maulidiyanti (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan vokasi berperan dalam pengembangan perekonomian bangsa yang secara tidak langsung dapat memberantas kemiskinan atau permasalahan-permasalahan lain di Indonesia.

Fokus dari pendidikan vokasi adalah untuk menciptakan lulusan yang siap kerja dimana ketika praktik kerja dilakukan maka tidak membutuhkan banyak teori namun membutuhkan kemampuan teknis secara langsung. Namun bukan berarti dalam dunia kerja teori tidak dibutuhkan sama sekali, hanya saja ilmu praktik dapat lebih bermanfaat jika sedang berada di lapangan secara langsung. Hal tersebut menyebabkan pembelajaran praktikum merupakan hal yang wajib untuk dipelajari.

Sumber daya manusia yang berkualitas harus mampu memahami transformasi di dunia industri dan memiliki daya saing secara global dengan memanfaatkan kompetensi pada bidang tertentu yang telah dipelajari dan dikuasai selama masa pendidikannya (Raharja, 2019). Adanya perubahan baik pada dunia industri maupun dunia kerja merupakan sesuatu yang mutlak, oleh karena itu hal tersebut perlu diantisipasi oleh sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan pada sektor tersebut. Daya adaptasi yang tinggi pada berbagai keadaan dapat membantu sumber daya manusia menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia industri dan dunia kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa demi bisa melaksanakan pembangunan bangsa, diperlukan adanya pendidikan vokasi yang dapat melahirkan siswa-siswa berkualitas yang siap menjadi seorang pekerja yang profesional. Pekerja profesional yang dimaksud adalah pekerja yang memiliki kompetensi-kompetensi tertentu, salah satunya adalah kemampuan dalam berwirausaha untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan di lingkungan masyarakat. Kemampuan atau kompetensi tersebut tidak hanya dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat namun juga untuk diri sendiri sebagai sarana pemenuhan kebutuhan individual.

Pemerintah setempat memberikan perhatian khusus pada pendidikan vokasi yang dapat dilihat dari terbitnya Inpres atau *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)* yang dibuat guna melakukan Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Instruksi Presiden yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 34 Gubernur, dan 12 Menteri Kabinet Kerja termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diterbitkan pada tanggal 9 September 2016 di Jakarta.

Revitalisasi pendidikan vokasi merupakan suatu keniscayaan yang memiliki beberapa urgensi yang meliputi:

1. akan dibangunnya taman-taman berbasis sains dan teknologi terkini pada daerah-daerah politeknik dan SMK-SMK berprasarana guna mewujudkan amanah nawacita. Urgensi tersebut juga berkaitan dengan penerapan SDGs atau *sustainable development goals* yang menyatakan akan adanya peningkatan pemuda juga orang dewasa yang memiliki keterampilan-keterampilan tertentu, diantaranya adalah keterampilan vokasi dan teknikal dalam berwirausaha pada tahun 2030
2. terwujudnya 58 juta tenaga kerja terampil sampai pada tahun 2030
3. persaingan tingkat regional dan global
4. menyiapkan generasi emas 2045
5. memperbaiki struktur tenaga kerja
6. meningkatkan mutu, relevansi, dan efisiensi tenaga kerja (Hendarman et al., 2016).

Sebagaimana yang tercantum dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2016, terdapat penugasan khusus oleh Presiden kepada sebelas kementerian/lembaga, diantaranya adalah pada Kemenristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) juga Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Tugas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diantaranya adalah, pertama, mempercepat penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan dan yang kedua adalah mengembangkan program studi di perguruan tinggi dalam rangka menghasilkan guru kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan SMK.

Sedangkan tugas untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya meliputi pembuatan peta jalan pengembangan SMK, adanya penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (*link and match*), peningkatan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK, peningkatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha/industri, peningkatan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, dan pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan SMK. Hadinya PPG Vokasi diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan tujuan merealisasikan Inpres Nomor 9 tahun 2016 mengenai revitalisasi SMK.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) Vokasi

Pendidikan profesi dapat didefinisikan sebagai pendidikan keahlian khusus bagi lulusan pendidikan formal pada program sarjana atau sederajat. Pendidikan profesi berfungsi sebagai sarana pengembangan bakat dan kemampuan peserta didik juga mencapai kecakapan dan kompetensi yang dibutuhkan pada dunia kerja. Pengertian lain dari pendidikan profesi adalah pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi individu yang telah menyelesaikan studi dalam tingkat sarjana atau sederajat untuk mengembangkan potensi, bakat, kemampuannya, serta kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja sebagai tenaga kerja profesional agar mampu memiliki daya saing yang tinggi.

Seorang guru yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam mendidik yang baik akan berpotensi untuk mengasihkan peserta didik yang berpotensi pula ketika turun ke lapangan. Seluruh pengetahuan dan ilmu yang didapat oleh peserta didik sebagian besar adalah hasil dari didikan dan bimbingan guru, demikian peran seorang guru sangat penting untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas.

Salah satu keterampilan yang perlu diberikan oleh guru vokasi kepada peserta didik adalah keterampilan abad 21 (*21st century skills*), seperti yang diungkapkan oleh Yuara, Rizal, & Kusumaningrum (2019), keterampilan abad 21 yang dibutuhkan mencakup hal-hal berikut:

1. *critical thinking and problem solving* (berpikir kritis dan pemecahan masalah), dalam hal ini peserta didik memerlukan kemampuan dalam berpikir kritis dalam melakukan penyelesaian masalah di dunia kerja
2. *creativity* (kreativitas), peserta didik memerlukan kreatifitas yang tinggi ketika terjun pada dunia kerja untuk dapat mengembangkan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman
3. *communication skill* (kemampuan berkomunikasi), peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi yang baik agar mengurangi adanya miskonsepsi
4. *collaborative* (kolaboratif), peserta didik harus dapat bekerja sama dengan orang lain agar mendapat hasil kerja yang lebih maksimal.

Perpaduan dari keterampilan-keterampilan tersebut dapat menghasilkan seorang tenaga pendidik yang berkualitas. Selain kompetensi abad 21 tersebut, sebagai penghasil lulusan yang akan bekerja pada industri global, guru juga memerlukan keterampilan yang berkaitan dengan kewirausahaan yang mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif (Priyadi, 2019). Kemampuan kewirausahaan atau *entrepreneurship* ini juga akan lebih baik jika dapat diterapkan pada proses pembelajaran untuk menjadi contoh dan acuan bagi peserta didik.

Terdapat kompetensi-kompetensi lainnya yang perlu dimiliki oleh seorang guru khususnya guru SMK, seperti yang diungkapkan oleh Usman & Darmono (2016), kompetensi-kompetensi tersebut meliputi kompetensi untuk memberikan pelajaran, kompetensi untuk mendidik, kompetensi untuk membimbing, kompetensi untuk mengarahkan, kompetensi untuk melakukan penilaian, dan kompetensi untuk melakukan evaluasi pada peserta didiknya.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan realisasi dari berbagai regulasi (Undang-undang Guru, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden) mengenai kewajiban pendidikan profesi untuk menghasilkan guru profesional. Tujuan dari PPG Vokasi adalah guna melahirkan tenaga-tenaga pendidik profesional khususnya pada sekolah menengah kejuruan (SMK) agar dapat mendidik peserta didik menjadi insan yang terampil, mampu berkompetisi dan terdepan.

Revitalisasi SMK tidak dapat berlanjut bahkan tidak dapat berhasil jika tidak adanya tenaga kejuruan yang berkompetensi, hal ini dikarenakan guru merupakan pusat dari seluruh pembangunan pendidikan (Khurniawan & Erda, 2019). Tanpa adanya seorang guru atau tenaga pendidik, maka kegiatan pada sektor pendidikan tidak dapat berlangsung. Guru atau tenaga pendidik memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu untuk bisa mendidik peserta didik, selain itu guru juga sudah memiliki kompetensi tertentu untuk dapat membantu peserta didik dalam melaksanakan praktik pembelajaran. Demikian seorang guru memiliki

fungsi sebagai seseorang yang membantu peserta didik dalam mencapai tujuannya dalam hal pendidikan yang akan berguna bagi karir masa depannya.

Berdasarkan hal tersebut, peran pendidikan vokasi diantaranya adalah sebagai pencipta tenaga atau lulusan terampil yang berkemampuan baik dari sekolah menengah kejuruan (SMK) maupun diploma (pendidikan tinggi) (Edison, 2019). Pendidikan vokasi juga memiliki peran untuk melahirkan tenaga profesional yang dapat bersaing di dunia industri maupun dunia internasional atau global. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, pendidikan profesi memiliki fungsi sebagai penggerak, motor, atau *leading sector* (sektor pemimpin) demi mewujudkan pembangunan Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Demi mewujudkan lahirnya peserta didik yang sesuai dengan kriteria tersebut, guru memiliki peran penting di dalamnya.

Dunia kerja maupun dunia industri memiliki sifat yang terus berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, demikian guru harus dapat mengajarkan peserta didik untuk dapat terus mengikuti perubahan atau fenomena yang ada. Kemampuan untuk beradaptasi tidak hanya diperlukan oleh lulusan pendidikan vokasi namun diperlukan juga oleh seorang guru agar dapat memberikan pemahaman dan contoh terkait dunia kerja yang selalu bersifat dinamis.

Senada dengan tujuan di atas, berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Nomor 55 Tahun 2017, program PPG memiliki tujuan untuk melahirkan lulusan-lulusan sarjana kependidikan maupun non kependidikan yang memiliki kompetensi sebagai guru profesional yang sesuai dengan ketentuan dan standar nasional yang telah ditetapkan dengan memperoleh sertifikat pendidik profesional baik pada tingkat pendidikan menengah, pendidikan dasar, maupun pendidikan usia dini.

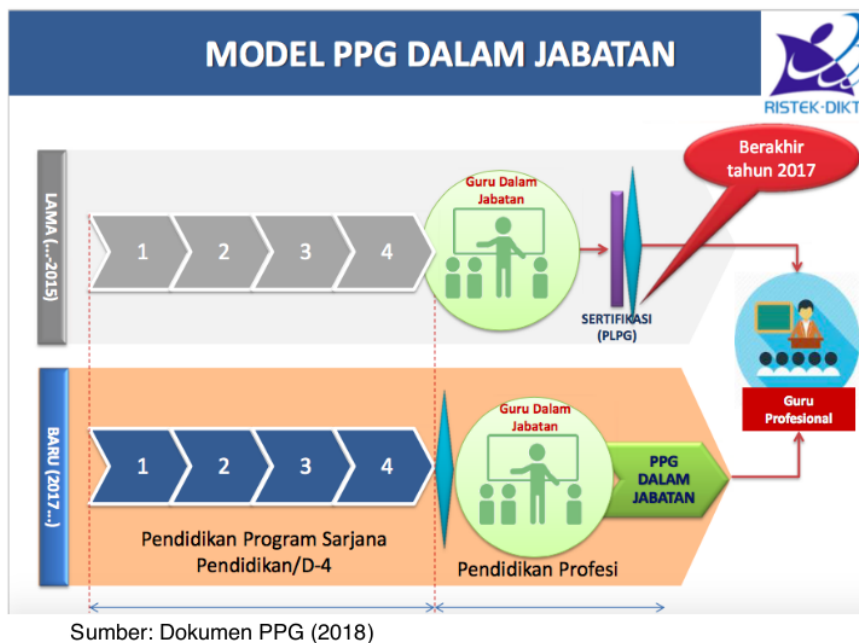
Model Pendidikan Profesi Guru (PPG) Vokasi

Hadirnya Program PPG memiliki tujuan utama sebagai penghasil sarjana kependidikan maupun diploma/sarjana non kependidikan yang menguasai kompetensi guru sesuai dengan standar yang berlaku. Kompetensi yang dikuasai diharapkan dapat sesuai dengan standar pendidikan nasional sehingga cikal bakal guru profesional ini bisa mendapatkan sertifikat pendidikan profesional baik pada pendidikan tingkat anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (sekolah dasar) maupun pendidikan tingkat menengah (menengah pertama dan menengah atas).

Terdapat beberapa permasalahan pendidikan yang dapat diatasi dengan hadirnya program studi PPG. Menurut Pannen et al., (2017) permasalahan-permasalahan pendidikan yang seringkali ditemui adalah sebagai berikut.

1. *shortage*, yakni kurangnya tenaga pendidik pada daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (T3) atau daerah pelosok. Kekurangan tenaga pendidik berarti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi pengajar yang sesuai untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik.
2. *unbalance distribution*, yakni distribusi pendidikan yang tidak seimbang atau tidak merata. Hal ini berpengaruh pada kualitas pendidikan pada daerah-daerah yang tidak diuntungkan karena penyebaran pendidikan yang kurang merata akan menyebabkan tidak merata pula kualitas pendidikan pada berbagai daerah.
3. *under qualification*, yakni kualifikasi pendidik yang di bawah standar sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi kurang berkualitas. Hal ini harus diantisipasi karena tenaga pendidik yang kurang kompeten dapat berpengaruh pada kualitas peserta didik yang dihasilkannya.
4. *low competence*, yakni kurangnya guru-guru yang memiliki kompetensi mengajar yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak efektif. Sama halnya dengan kualifikasi pendidik yang kurang, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pengoptimalan kualitas dari peserta didik.
5. *missmatched*, yakni ketidaksesuaian tenaga kependidikan dengan bidang pendidikan yang diampu. Hal ini dapat menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan lain seperti ketidaksesuaian bahan ajar atau materi yang disampaikan juga kecenderungan munculnya miskonsepsi terhadap materi yang disampaikan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik.

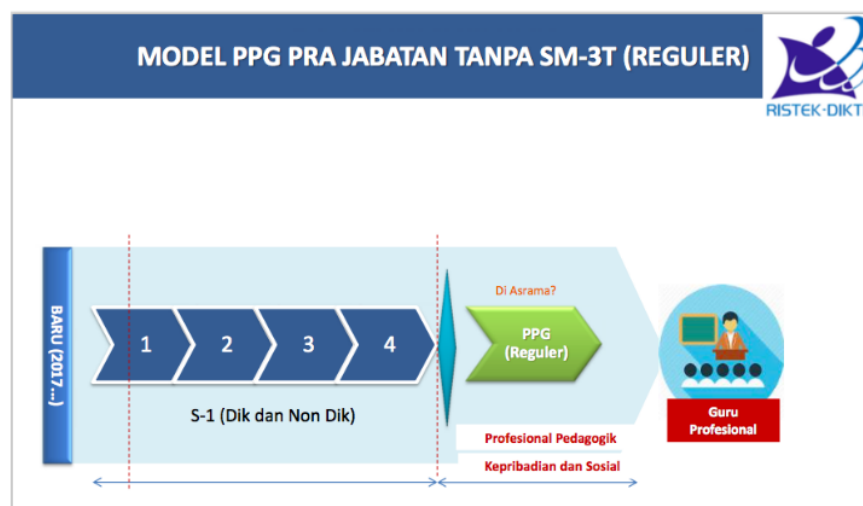
Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu adanya solusi dari permasalahan pendidikan yang ada. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan adanya Program PPG. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (yang sekarang berada di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) telah mengadakan program PPG sejak tahun 2009 yang terbagi menjadi dua jenis. Program PPG dengan bantuan biaya pendidikan atau disebut juga sebagai Program PPG dalam Jabatan Bersubsidi.



Gambar 1
Model PPG dalam Jabatan

Penjelasan lebih lanjut terkait Program PPG dalam Jabatan Bersubsidi dapat dilihat pada Gambar 1. Pengadaan Program PPG dalam Jabatan Bersubsidi hadir untuk para guru yang belum mendapatkan sertifikasi sebagai tenaga pendidik. Program ini telah diselenggarakan sejak tahun 2009 dengan nama PLPG dimana proses sertifikasi PLPG telah berakhir pada tahun 2017. Setelah itu dilanjutkan dengan program PPG dalam jabatan dengan subsidi pemerintah

Program kedua yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2017 dan masih berlangsung hingga saat ini adalah Program PPG Pra-Jabatan Bersubsidi. Pada tahun 2018, Program PPG Pra-Jabatan Bersubsidi telah memasuki gelombang ke-2. Sasaran dari program ini adalah calon guru dengan bantuan biaya pendidikan. Program ini diikuti oleh lulusan sarjana S1 baik dari kependidikan ataupun non kependidikan. Model PPG Pra-Jabatan Bersubsidi dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: Dokumen PPG (2018)

Gambar 2
Model PPG Pra-Jabatan

Pelaksanaan PPG dimulai dari proses pendaftaran dan seleksi administrasi kemudian dilanjutkan dengan tes kompetensi bidang (TB), tes potensi akademik (TPA) dan tes kemampuan bahasa Inggris (TKBI). Calon peserta yang lolos, selanjutnya masuk ke tahap seleksi bakat, minat dan kepribadian (BMK). Peserta yang dinyatakan lulus, melakukan registrasi *online* dan orientasi akademik awal untuk selanjutnya menjalani pelaksanaan PPG selama kurun beberapa waktu (PPG dalam jabatan selama 4 bulan, PPG prajabatan selama 1 tahun). Evaluasi dilakukan melalui serangkaian tes, dimana peserta yang lulus berhak mendapatkan sertifikat. Program PPG dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran dan penilaian, hingga uji kompetensi, sehingga diharapkan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air (Pannen et al., 2017).

Kurikulum PPGV Dalam Jabatan memuat pematangan akademik pedagogik juga pematangan bidang studi. PPGV Dalam Jabatan cenderung menganut model konkuren terlebih peserta didiknya adalah sarjana pendidikan yang sebelumnya telah mempelajari baik keilmuan pedagogik maupun bidang studi. Model pendidikan guru konkuren memungkinkan integrasi pendalaman bidang pedagogik ke dalam studi sehingga siswa memiliki kompetensi pedagogis dan kepribadian yang matang (Vainoryte & Paciauskiene, 2015). Model PPGV Pra Jabatan cenderung menggunakan model konsekutif dimana muatan kurikulumnya adalah pendalaman pedagogik juga peserta didiknya didominasi sarjana non pendidikan yang sebelumnya telah menguasai keilmuan bidang studi.

SIMPULAN

Penyiapan guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan suatu upaya untuk menghasilkan guru profesional dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sehingga mampu menciptakan generasi Indonesia yang unggul dan kompetitif. Penyelenggaraan PPG di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang terdiri atas Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri juga Keputusan Menteri. PPG Vokasi dikembangkan dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam rangka merealisasikan *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2016* mengenai revitalisasi SMK. Model PPGV di Indonesia saat ini menggunakan model konkuren dan konsekutif. PPGV Dalam Jabatan menggunakan model konkuren di mana dalam kurikulumnya memuat keilmuan bidang studi dan pendidikan. PPGV Pra Jabatan menggunakan model konsekutif di mana dalam kurikulumnya memuat keilmuan pendidikan, terlebih peserta didiknya merupakan sarjana non pendidikan yang telah mempelajari keilmuan bidang studi.

CATATAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini serta menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, M. (2017). *The Sage Encyclopedia Of Communication Research Methods*. SAGE Publications, Inc, 1(4). <https://doi.org/10.4135/9781483381411>
- Edison. (2019). Peran dan Kompetensi Pendidikan Vokasi Teknik Elektro Di Era RI 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pendidikan Pascasarjana UNIMED*. Retrieved from <http://digilib.unimed.ac.id/38831/>
- Ganefri, Hidayat, H., Yulastri, A., Mardin, A., Sriwahyuni, D., & Akmal, A. Z. (2018). Perangkat Pembelajaran Pedagogi Entrepreneurship Dengan Pendekatan Pembelajaran Berbasis Produk Di Pendidikan Vokasi. *Seminar Nasional Edusainstek*. Retrieved from <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/4098/3807>
- Hartanto, C. F. B., Rusdarti, & Abdurrahman. (2019). Tantangan Pendidikan Vokasi di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul. *SEMINAR NASIONAL PASCASARJANA*.
- Hendarman, Suharti, Nizam, Faaturahman, Khurniawan, A. W., & Lestari, S. P. (2016). *Revitalisasi Pendidikan Vokasi*. Indonesia.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. (2016).
- Khurniawan, A. W., & Erda, G. (2019). *Darurat Guru Kejuruan Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/286135046.pdf>
- Mulianti, Prasetya, F., & Mulyadi, R. (2018). Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi: Peran Faktor dan Indikator yang Berpengaruh. *Seminar Nasional Asosiasi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan Indonesia (APTEKINDO)*. Retrieved from http://repository.unp.ac.id/19589/1/MULIANTI_ARTIKEL_12.pdf
- Munadi, B. A., & Triwiyono, E. (2018). Implementasi Problem Based Learning dalam Peningkatan Aktivitas dan Kognitif Siswa SMK. *Jurnal Dinamika Vokasional Teknik Media*, 3(1). Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/dynamika/article/view/19110/10588>
- Pannen, P., Nurwardani, P., Ridwan, Mulyono, E., Sudarsono, & Bintoro, T. et. al. (2017). *Pedoman Penyelenggaraan PPG*. Indonesia.
- Pasangaji, A. A. (2018). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Revitalisasi Sistem Pembelajaran Di Sekolah Menengah Kejuruan. *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Otomotif*. Retrieved from <http://eproceedings.umpwr.ac.id/index.php/semnaspto/article/view/1271/1093>
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2017). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*. (2008).
- Prihadi, W. R. (2019). Model Teacherpreneur Pada Pembelajaran Vokasi Menghadapi Era Disrupsi Dan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Teknik Sipil*, 1(1). Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpts/article/view/28274/12740>

- Raharja, H. Y. (2019). Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 dan Society 5.0 Di Pendidikan Tinggi Vokasi. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*, 2(1). Retrieved from <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/DECA/article/view/1311/808>
- Sari, N. (2018). Analisis Pengaruh Kepribadian, Lingkungan Keluarga Dan Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha: Studi Kasus Pada Siswa/ I SMK Purnama 1 Jambi. *Ekonologi: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(1). Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi/article/view/1361/1119>
- Soebagyo, J., & Purnama, W. (2019). Peningkatan Kompetensi Guru Matematika SMK Melalui Program Revitalisasi di PPPPTK BMTI. *Euclid*, 6(2). Retrieved from <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Euclid/article/view/2184/1410>
- Suciati, P., & Maulidiyanti, M. (2019). Kekuatan 7p Bauran Pemasaran Terhadap Pilihan Mahasiswa Berkuliah Di Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(2). Retrieved from <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/view/61/36>
- Sukoco, J. B., Kurniawati, N. I., Werdani, R. E., & Windriya, A. (2019). Pemahaman Pendidikan Vokasi di Jelang Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat. *JURNAL PENGABDIAN VOKASI*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/4796/2756>
- Thadi, R. (2019). Proses komunikasi Instruksional Dalam Pembelajaran Vokasional. *JOEAI (Journal of Education and Instruction)*, 2(1). Retrieved from <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOEAI/article/view/614/415>
- Triyono, M. B. (2017). Tantangan Revolusi Industri Ke 4 (I4.0) Bagi Pendidikan Vokasi. *Seminar Nasional Vokasi Dan Teknologi (SEMNASVOKTEK)*. Retrieved from <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/semnasvoktek/article/view/653/495>
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20. (2003).*
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (2005).*
- Usman, H., & Darmono. (2016). *Pendidikan Kejuruan Masa Depan*. Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/130683974/1ainlain/Draft Pendidikan Kejuruan Masa Depan Puskurbuk 2016.pdf>
- Vainoryte, B., & Paciauskiene, Z. (2015). The Concurrent and Consecutive Models of Initial Teacher Training: Problematics and Tendencies. Rural Environment, Education, Personality. *Jelgava*, 16.
- Verawadina, U., Jalinus, N., & Asnur, L. (2019a). Kurikulum Pendidikan Vokasi Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan*, 20(1). Retrieved from <http://www.jurnal.ut.ac.id/index.php/jp/article/view/240/218>
- Verawadina, U., Jalinus, N., & Asnur, L. (2019b). Mengkaji Kurikulum Di Era Revolusi Industri 4.0 Bagi Pendidikan Vokasi. *Wahana Didaktika*, 17(2). Retrieved from <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/didaktika/article/view/2834/3833>
- Wurianto, A. B. (2018). Pengembangan Pendidikan Vokasi Bidang Sosio-Humaniora Menghadapi Revolusi Industri Era 4.0. *Seminar Nasional Vokasi Indonesia*. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Prosiding-Seminar-Nasional-Vokasi-Indonesia/publication/328926920_Pengembangan_Pendidikan_Vokasi_Bidang_Sosio-Humaniora_Menghadapi_Revolusi_Industri_Era_40/links/5beba1dca6fdcc3a8dd47553/Pengembangan-Pendidikan-Vokasi-
- Yuara, Y. P., Rizal, F., & Kusumaningrum, I. (2019). Kesiapan Guru Vokasi SMKN 1 Sumatera Barat dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3). Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIPP/article/view/21836>
- Yusuf, A. R., & Mukhadis, A. (2018). Model Pengembangan Profesionalitas Guru Sesuai Tuntutan Revitalisasi Pendidikan Vokasi di Indonesia. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 9(2). Retrieved from <http://journal.unilak.ac.id/index.php/lectura/article/view/1613/1118>

Ibu_Mustika_-_Artikel-Rev1.docx

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes Off

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On